



Analisis minat perbankan dalam keuangan berkelanjutan

Melissa Gumantiny

Universitas Padjadjaran

melissagumantiny@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 April 2022

Disetujui 20 April 2022

Diterbitkan 25 April 2022

Kata kunci:

Keuangan Berkelanjutan,
Edukasi, Standar Prosedur
Operasional, Rencana
Keuangan Berkelanjutan

Keywords :

Sustainable Financing,
Education, Standard
Operational Procedure,
Sustainable Finance
Planning

ABSTRAK

Keuangan berkelanjutan merupakan salah satu program pembiayaan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilihat dari salah satu syarat utamanya mengenai kegiatan operasional perusahaan yang tidak merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat perbankan mengenai program keuangan berkelanjutan pada waktu sebelum dan sesudah perbankan memiliki regulasi wajib melaksanakan program tersebut. Metode penelitian yang dilakukan yaitu analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia, khususnya pada perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kategori BUKU 3 dan BUKU 4 memiliki perhatian pada program keuangan berkelanjutan pada waktu sebelum pengesahan regulasinya. Tahun 2015 dan tahun 2016 perhatian ini semakin meningkat, dan mengalami peningkatan yang tinggi setelah adanya regulasi pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan minat yang rendah sebelum adanya regulasi, hanya perhatian untuk mempelajari dan merencanakannya.

ABSTRACT

Sustainable financial is one of the financial programs created by Otoritas Jasa Keuangan for supporting sustainable development. With this program, it is expecting to encourage companies to participate in sustainable development, this can be seen from one of the main requirements regarding to the operational activities that conduct by the company's for not damaging the environment. This research is written to know the banking interest regarding sustainable finance program from before and after the banking have the requirement for implementing the program. The research method that used for this research is quantitative analysis and for the approach is using descriptive approach. The result of this research will show that banking in Indonesia, especially banking that have been registered in Bursa Efek Indonesia (BEI) with BUKU 3 and BUKU 4 category, having concern on sustainable financing program before the regulation confirmation. In 2015 and 2016 this concern have been increasing, and experience an increase, and have been experience a significant increasing after adding the regulation in 2017. This showed a low interest before the regulation has been added, just the attention for studying and planning.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Usaha di Indonesia semakin bertumbuh dalam segi jumlah usaha, jumlah jenis usaha, hingga skala usaha. Didukung dengan banyaknya perusahaan asing yang berkembang di Indonesia, usaha-usaha lokal yang sedang berada pada tahap berkembang mendapatkan dampaknya. Dampak positif yang dibawa oleh perusahaan asing dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, dan untuk meningkatkan sistem kerja, tetapi selain itu juga terdapat juga dampak negatifnya, salah satunya yaitu persaingan yang semakin ketat. Hal ini dapat menjadi bumerang bagi usaha-usaha lokal yang berada pada tahap berkembang, khususnya yang tidak memiliki modal untuk memperkuat usahanya. Maka dari itu banyak usaha-usaha yang membutuhkan modal untuk memperkuat usahanya dengan cara melakukan peminjaman dana ke bank atau lembaga pendanaan lainnya.

Indonesia memiliki 26,71 juta usaha menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Ekonomi 2016. Komposisi dari usaha di Indonesia masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan jumlah 26,26 juta atau sebesar 98,33%, dan sisanya adalah Usaha Menengah Besar (UMB). Jumlah ini meningkat dari Sensus Ekonomi 2006 sebesar 17,51% yang semula sejumlah 22,73 juta usaha (Okezone, 2017). Dalam memenuhi kebutuhan operasional usaha, perusahaan mikro, kecil, menengah, dan besar biasanya akan melakukan peminjaman uang ke bank atau ke lembaga pembiayaan lainnya yang dapat memberikan kredit. Salah satu contohnya yaitu

UMKM yang sedang marak di Indonesia, pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2018 mengalami kenaikan setiap bulannya, dan jumlah kredit UMKM dan Non-UMKM secara keseluruhan sebesar 5.194.401 miliar rupiah (Bank Indonesia, 2018).

Ketika setiap unit usaha mendapatkan kredit dari bank sebagai lembaga pembiayaan tanpa meninjau kembali dampak dari proyek yang dikerjakan terhadap lingkungan maka dapat berbahaya bagi lingkungan di masa yang akan datang. Salah satu contohnya yaitu jika lembaga pembiayaan seperti bank memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini mendukung proyek yang dilakukan perusahaan tersebut, dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan proyek yang dilaksanakan sehingga kerusakan lingkungan akan terus semakin bertambah. Tetapi terdapat kasus yang disengaja oleh bank untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari unit usaha tersebut walaupun bank mengetahui bahwa proyek yang dijalankan bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan. Kasus ini terdapat pada dua bank yang tercatat menyalurkan dana kepada perusahaan kelapa sawit, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kedua bank tersebut mengaku memberikan dana kepada perusahaan kelapa sawit, US\$177,25 juta dari BNI, dan US\$370 juta dari Bank Mandiri. Kedua bank tersebut mengaku telah mengikuti regulasi pemberian dana kepada perusahaan, salah satunya dengan melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek yang dikerjakan perusahaan dan akan memutuskan pinjaman kredit yang diberikan jika perusahaan tersebut terbukti melakukan usaha dengan dampak merusak lingkungan (Sari E. V., 2016).

Selain kasus yang menimpa BNI dan Bank Mandiri yang memberikan kredit kepada perusahaan kelapa sawit, beberapa bank memberikan kredit kepada unit usaha yang bergerak pada bidang perkayuan, kertas, dan daur ulang kertas. BNI juga tercatat memberikan kredit kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan yang sebagian besar proses bisnisnya menebang pohon untuk memperjual belikan kayunya. BNI memberikan kredit sebesar US\$ 89,93 juta untuk Rajawali Group melalui BW Plantation, US\$49,35 juta kepada Gozco Group melalui Golden Blossom Sumatra, dan US\$400 ribu ke Barito Pacific Group. Tetapi pinjaman ini dapat dihentikan jika perusahaan terbukti secara hukum jika melakukan perusakan lingkungan walaupun pemberian kredit ini sudah termasuk dalam *committed loan*, hal ini diungkapkan oleh Herry Sidharta, Direktur Bisnis dan Korporasi BNI. Hal ini tidak akan terjadi menurut Harry karena BNI merupakan salah satu bank yang termasuk dalam kelompok perseroan yang fokus dengan masalah lingkungan hidup pada Bursa Efek Indonesia (Sari E. V., 2016).

Jika kasus pembiayaan pada perusahaan kelapa sawit dan perkayuan berjalan baik tanpa melakukan AMDAL, dan perusahaan tersebut merusak lingkungan, khususnya hutan di Indonesia, maka hutan lindung akan semakin berkurang. Pada tahun 2016, total luas hutan Indonesia mencapai 124 juta hektar, sejak tahun 2010 sampai 2015 Indonesia kehilangan 684.000 hektar setiap tahunnya. Angka ini menempati urutan negara kedua terbesar yang mengalami kehilangan hutan setiap tahunnya (Cipto, 2016). Salah satu penyebab berkurangnya hutan di Indonesia yaitu industri kayu, kelapa sawit, dan pertambangan yang semakin meningkat di Papua Barat sehingga terjadi deforestasi atau penebangan hutan untuk mengalih fungsikan hutan menjadi non-hutan, di Provinsi Kalimantan Timur deforestasi dikarenakan banyaknya lahan untuk perkebunan tanaman komersial, pertambangan emas, dan pertambangan batu bara (Ramadhan, 2018). Selain di Papua Barat dan Kalimantan Timur, di Aceh pun mengalami penyusutan luas hutan, pada periode bulan Januari sampai Juni 2018 kerusakan hutan sudah mencapai 3.290 hektar dengan rincian Nagan Raya 267 hektar, Aceh Timur 559 hektar, dan Gayo Lues 507 hektar. Hal ini terjadi untuk mengalih fungsikan hutan menjadi lahan baru dan *illegal logging* (Umar, 2018).

Selain dari kasus alih fungsi hutan yang merusak lingkungan terdapat juga kasus lain seperti, pencemaran air dengan cara membuang sampah dan limbah berbahaya ke sungai. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, air sungai di Indonesia sudah tercemar sebesar 75 persen dan didominasi oleh limbah domestik, diatas 60 persen pencemaran air disebabkan limbah domestik (Putra, 2017). Data Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mendapati 52 sungai berstatus tercemar berat, 20 sungai berstatus tercemar sedang, dan 7 sungai berstatus tercemar ringan. Data tersebut didapat dari total 100 aliran sungai pada 33 provinsi di Indonesia dan hanya 21 sungai yang berstatus memenuhi baku mutu (Widhana, 2017). Tercemarnya aliran sungai dapat menjadi bencana bagi pemukiman di sekitarnya, bagi mereka sungai dapat menjadi salah satu sumber daya untuk bertahan hidup, pencemaran ini juga dapat termasuk dalam merusak lingkungan dan melanggar undang-undang.

Ketika bank memberikan kredit kepada unit usaha yang terlibat dalam merusak lingkungan berarti bank mendukung hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 berisi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan ini diperbaharui dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada undang-undang, tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk perseroan hanya dijelaskan secara umum yang pada intinya tanggung jawab ini masuk dalam anggaran perusahaan dan jika perusahaan tidak melakukan tanggung jawab ini maka akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan pada peraturan pemerintah, tanggung jawab sosial dan lingkungan dibahas secara mendalam bagaimana perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain dari peraturan yang disusun oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengimbau kepada lembaga pembiayaan, baik bank dan non-bank untuk tidak memberikan kredit kepada unit usaha yang melakukan pencemaran lingkungan (Laucereno, 2015).

OJK memberikan imbauan salah satunya dengan mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan pada Desember 2014 sehingga dapat digunakan tahun 2015. Roadmap ini bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang diinginkan terkait dengan keuangan berkelanjutan pada jangka pendek, menengah, dan panjang (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Selain itu juga OJK akan memberikan apresiasi berupa penghargaan *Sustainable Finance Award* (SFA) kepada perusahaan Lembaga Jasa Keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dalam visi dan misi, disisi lain juga pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan dalam mengembangkan kembali program ini. SFA pertama kali diberikan pada tahun 2016 terdiri dari empat kategori dan masing-masing kategori dibagi berdasarkan kriteria Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Salah satu kriteria yaitu *Best of The Best* yang hanya akan diberikan kepada satu perusahaan yang memiliki penilaian tertinggi diantara nominasi pada kriteria lain, tahun 2016 kriteria ini dimenangkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Pada tahun 2017 OJK membuat peraturan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan untuk perbankan dan non-perbankan sebagai lembaga pembiayaan dan pasar modal sebagai penerima pembiayaan. Peraturan ini terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang didalamnya berisi rincian mengenai peraturan pemberian kredit kepada unit usaha dengan ketentuan keuangan berkelanjutan disertai dengan kategori bank yang wajib menjalankan program ini. Salah satu kategorinya yaitu bank yang termasuk dalam BUKU 3 dan BUKU 4 diwajibkan untuk melakukan persiapan program ini sebelum tahun 2019. Adanya peraturan mengenai keuangan berkelanjutan atau pembiayaan berkelanjutan ini diharapkan lembaga pembiayaan, khususnya perbankan, dapat membantu menjaga lingkungan walaupun tidak secara langsung dan tujuan dari keuangan berkelanjutan untuk menyeimbangkan *profit, people, dan planet* dapat tercapai. Dengan adanya peraturan ini diharapkan perusahaan yang memiliki minat lebih dapat menerapkan sesuai dengan aturan dan pedoman yang sudah ditetapkan sehingga dapat lebih rinci dan lebih jelas lagi dibandingkan dengan roadmap.

Awal penerapan program keuangan berkelanjutan pada tahun 2014 dan dipelopori oleh delapan bank, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Artha Graha, Bank BJB, BRI Syariah, dan Bank Muamalat. Kedelapan bank ini mewakili 46% aset perbankan yang ada di Indonesia dan sebagai *First Movers on Sustainable Banking* (Sulaiman, 2018). Tahun 2018, tepatnya pada bulan Mei kelompok *First Movers* dibantu dengan Yayasan WWF Indonesia membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Dengan adanya IKBI diharapkan antar bank dapat berbagi pengalamannya dalam menerapkan keuangan berkelanjutan (WWF Indonesia, 2018). Tahun 2019, pada bulan November IKBI menerima lima bank sebagai anggotanya, kelima bank tersebut adalah Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Maybank Indonesia, Bank HSBC Indonesia, dan Bank Mandiri Syariah. Total anggota IKBI pada tahun 2019 bertumbuh menjadi 13 bank dan mewakili 60% aset perbankan nasional (Richard, 2019).

Salah satu contoh penerapan keuangan berkelanjutan ini dilakukan oleh BNI yang berkomitmen untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip *sustainable finance*, seperti pembangkit listrik, jalan tol, transportasi, konstruksi, dan manufaktur. BRI pun kalah akan menerapkan keuangan berkelanjutan ini dengan program pembiayaan hijau, seperti *green bond*, dan *green MTN*. Jika BRI menerapkan pembiayaan hijau, BRI Syariah menerapkan CSR dengan pembiayaan pada mikro hidro yang ramah lingkungan. Bank Muamalat menerapkannya dengan cara menerapkan *green financing*, langkah ini

diambil untuk meminimalisir risiko yang diperoleh bank dari kedelapan bank yang menjadi pelopor dalam keuangan berkelanjutan, masing-masing bank memiliki prosedur dalam menjalankannya, walaupun begitu tetap mematuhi peraturan yang mengatur keuangan berkelanjutan secara keseluruhan (Yudistira, 2018).

Dalam mendukung program-program keuangan berkelanjutan yang akan diberikan kepada masyarakat terdapat persiapan yang penting diperhatikan oleh bank. Salah satunya yaitu menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), hal ini sudah dilakukan oleh Bank BJB. Selain itu Bank BJB juga sudah melakukan penyesuaian pada Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk program pembiayaan berkelanjutan. Menurut *Head of Corporate Secretary Division* Bank BJB, Muhammad Asadi Budiman, sudah mulai melakukan pengembangan internal untuk program pembiayaan berkelanjutan dan juga program lain dalam keuangan keberlanjutan (Arief, 2019). Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Bank BJB dalam menghadapi program pembiayaan berkelanjutan menandakan Bank BJB sudah mulai melakukan tahap awal menuju penerapan program ini. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki minat terhadap keuangan berkelanjutan sebelum peraturan diberlakukan secara efektif.

Penelitian ini akan membahas minat atau ketertarikan perbankan dan kesiapan perbankan terkait dengan keuangan keberlanjutan yang akan diberlakukan secara efektif pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui minat perbankan dalam keuangan berkelanjutan yang dapat dinilai melalui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh perbankan. Populasi dari penelitian ini yaitu bank yang masuk dalam kategori BUKU 3 dan BUKU 4 secara konsisten dari tahun 2015 sampai dengan 2018, dan diperoleh 22 bank. Hal ini dapat diperhatikan dengan adanya bank yang menjadi pelopor dan dijadikan contoh dalam penerapan secara efektif sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Minat Perbankan Dalam Keuangan Berkelanjutan”**.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS 25 untuk menguji data dan *software* Microsoft Excel untuk mengolah data. Uji data yang dilakukan yaitu, analisis isi, statistik deskriptif dan analisis tabulasi silang untuk mengetahui minat dan persiapan perbankan dalam keuangan berkelanjutan.

1. Analisis Isi Kuantitatif. Analisis isi kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengukur aspek tertentu yang terdapat dalam sebuah alat komunikasi tertulis, seperti majalah, laporan, dan dokumen. Metode ini dilakukan secara kuantitatif, dengan prosedur mengukur dan menghitung aspek dari isi suatu dokumen dan disajikan dalam bentuk kuantitatif. Pendekatan analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi deskriptif yang menggambarkan secara detail suatu pesan dalam suatu teks tertentu (Eriyanto, 2011).
2. Analisis Statistik Deskriptif. Pengujian dengan statistik deskriptif ini akan menyajikan rangkuman gambaran data yang diperoleh. Dengan rangkuman data statistik ini dapat dilakukan analisis deskriptif yang lebih lengkap. Statistik deskriptif akan menyajikan data berupa nilai *minimum*, nilai *maximum*, nilai *mean*, dan *standard deviation* (Priyatno, 2012).
3. Analisis Tabulasi Silang (*Crosstab*). Tabulasi silang atau yang biasa disebut dengan *crosstab* menyajikan data dalam bentuk tabulasi dengan data pada baris dan kolom (Ghozali, 2013). *Crosstab* akan menyajikan data dalam bentuk persentase dengan mengolah data menyilang data yang tersedia. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui korelasi antar faktor (Putri, Wibawa, & Persada, 2017). Data yang digunakan merupakan sampel yang diambil dalam periode 2015 hingga 2018, lalu dikelompokkan berdasarkan kategori dan kepemilikan bank sehingga hasil dari *crosstab* ini dapat mendukung hasil analisis isi.
4. Uji Normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu pengujian yang perlu dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan analisis statistik untuk melakukan uji normalitas dengan *skewness* dan *kurtosis*. *Skewness* merupakan ukuran distribusi data. Distribusi data normal diperoleh dari rasio *skewness* yang dihitung dengan *skewness* dibagi dengan standar

error of skewness. Jika rasio *skewness* berada pada nilai -2 sampai dengan 2 maka distribusi data normal. *Kurtosis* merupakan ukuran distribusi data. Distribusi data normal diperoleh dengan rasio *kurtosis* yang dihitung dengan *kurtosis* dibagi dengan standar *error of kurtosis*. Jika rasio *kurtosis* berada pada nilai -2 sampai dengan 2 maka distribusi data normal.

5. Uji Validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji alat ukur yang digunakan mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas yang digunakan yaitu analisis faktor, dengan alat ukurnya jumlah kosakata dan frasa yang diungkapkan mengenai persiapan perbankan, dan yang ingin diukur yaitu minat perbankan dalam keuangan berkelanjutan yang ditunjukkan dengan persiapan yang dilakukan serta diungkapkan dalam laporan yang dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan metode uji *confirmatory factor analysis* (CFA) untuk menguji indikator yang digunakan dapat menggambarkan variabel (Ghozali, 2013). Kelayakan variabel dilihat dari nilai KMO and Bartlett's test diatas 0,50 dengan signifikansi dibawah 0,05 dan nilai Anti-image untuk Measures of Sampling Adequacy (MSA) diatas 0,50 pada setiap item menunjukkan kelayakan faktor tersebut untuk menggambarkan variabel penelitian (Syamsudin, 2016).
6. Uji Reliabilitas. Dalam penelitian alat ukur yang valid dan reliabel atau handal dibutuhkan. Uji reliabilitas digunakan dalam pengujian alat ukur untuk mengetahui konsistensi alat ukur (Priyatno, 2012). Penelitian ini menggunakan pengukuran reliabilitas dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali. Pengukuran ini dilakukan sekali kepada sampel bank dengan menemukan kosakata dan frasa mengenai persiapan perbankan untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan sebagai bukti minatnya melalui laporan yang dipublikasikan. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode uji statistik *cronbach alpha*, dan variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* diatas 0,70 (Ghozali, 2013). Nilai *cronbach alpha* kurang dari 0,60 kurang baik atau kurang reliabel, nilai 0,70 dapat diterima, dan diatas 0,80 adalah baik atau sangat reliabel (Priyatno, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil data dari sampel yang diperoleh dengan cara analisis isi dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) selama 4 periode dari tahun 2015-2018. Analisis isi ini menggunakan unit sintaksis unit bahasa yang digunakannya yaitu kata. Kata-kata yang diambil terdiri dari tiga kelompok yang merupakan persiapan yang perlu dilakukan oleh perbankan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan pada tahun 2019. Persiapan tersebut yaitu edukasi internal, penyesuaian Standar Prosedur Operasional (SPO), dan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Pengungkapan pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) selama empat periode (2015-2018) secara keseluruhan berjumlah 366 kata dan frasa kata, sedangkan pengungkapan pada Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) selama empat periode (2015-2018) secara keseluruhan berjumlah 804 kata dan frasa. Media cetak Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang dipublikasikan oleh bank mengungkapkan lebih banyak mengenai keuangan berkelanjutan. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) berisi mengenai laporan yang akuntabel mengenai kinerja organisasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam laporan ini juga berisi mengenai pengukuran dan pengungkapan program dan upaya yang dilakukan oleh perbankan agar mendukung pembangunan berkelanjutan (Aziz, 2014). Pengungkapan mengenai persiapan keuangan berkelanjutan ini lebih banyak diungkap dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sehingga perbankan menerapkan keuangan berkelanjutan dengan lebih mengarah pada program tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan oleh perusahaan secara individu perusahaan, dan dapat menggerakkan perusahaan lain untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program kerjasama untuk memberikan pinjaman dana.

Tabel 1 Data Tahap Persiapan Keuangan Berkelanjutan Pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

BANK	2015	2016	2017	2018	TOTAL	KATEGORI	KEPEMILIKAN
BJB	2	6	17	92	117	BUKU 3	Pemerintah
BTN	0	18	29	96	143	BUKU 3	Pemerintah
Jatim	0	7	0	29	36	BUKU 3	Pemerintah
OCBC	3	1	1	118	123	BUKU 3	Swasta
Permata	1	1	12	52	66	BUKU 3	Swasta
Mandiri	4	8	60	68	140	BUKU 4	Pemerintah
BNI	3	7	45	71	126	BUKU 4	Pemerintah
BRI	2	14	42	72	130	BUKU 4	Pemerintah
BCA	14	7	33	109	163	BUKU 4	Swasta
Niaga	14	14	12	86	126	BUKU 4	Swasta
TOTAL	43	83	251	793	1170		

Sumber: Data diolah, 2020

Pengungkapan tahap persiapan implementasi keuangan berkelanjutan secara umum yang diungkapkan pada kedua laporan bank yang dipublikasikan pada periode 2015 hingga 2018 selalu meningkat. Tahun 2016 terjadi peningkatan pengungkapan sebesar 93% dari pengungkapan tahun 2015, hal ini dapat terjadi dikarenakan kesadaran perbankan untuk mengikuti perkembangan program baru. Peningkatan pengungkapan tahun 2017 sebesar 202% dari tahun 2016, peningkatan ini dikarenakan aturan yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2017 mengenai kewajiban perbankan untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. BUKU 3 dan BUKU 4 mulai memiliki kewajiban tersebut pada tahun 2019, sehingga terjadi peningkatan pengungkapan yang lebih tinggi lagi pada tahun 2018 mencapai 216%. Tahun 2018 merupakan tahun terakhir perusahaan melakukan persiapan implementasi keuangan berkelanjutan. Dengan adanya persiapan yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 dapat memperlihatkan adanya minat perbankan dalam keuangan berkelanjutan. Tetapi ketika regulasi atau aturan resminya dikeluarkan pada tahun 2017 maka terjadi peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2017 dan stabil di tahun 2018 hal ini menandakan minat yang terjadi di tahun 2015 dan 2016 merupakan perhatian yang perbankan lakukan untuk menanggapi program keuangan berkelanjutan. Selain itu juga hal ini memperlihatkan bahwa teori institusional dapat terbukti, ketika adanya regulasi baru maka organisasi akan mengalami perubahan dan semakin lama akan memiliki kebiasaan yang baru.

Perbankan yang termasuk dalam kategori BUKU 3 merupakan bank yang memiliki modal inti sebesar 5 triliun hingga 30 triliun. Dalam sampel penelitian sebesar 50% yaitu BJB, BTN, Jatim, OCBC, dan Permata termasuk dalam kategori ini. Pada tahun 2015, 60% bank pada kategori BUKU 3 sudah mengungkapkan mengenai keuangan berkelanjutan, walaupun pengungkapannya tidak dalam jumlah yang besar tetapi memperlihatkan perbankan memiliki perhatian dalam mempersiapkan implementasi keuangan berkelanjutan. Tahun 2016, secara keseluruhan perbankan pada kategori BUKU 3 sudah mengungkapkan persiapan yang dilakukan untuk implementasi keuangan berkelanjutan. Secara keseluruhan juga jumlah pengungkapan meningkat sejumlah 450%, walaupun terdapat bank yang mengalami penurunan pengungkapan tetapi dilengkapi dengan peningkatan pengungkapan pada bank

lain. Penurunan pengungkapan ini terdapat pada Bank OCBC, hal ini dapat dikarenakan tingkat kredit macet yang dimilikinya meningkat 45% dari tahun sebelumnya sehingga hal ini berdampak pada keadaan ekonomi untuk melakukan lebih banyak kegiatan persiapan.

Tahun 2017 pengungkapan persiapan implementasi keuangan berkelanjutan tetap meningkat sebesar 79%. Pengungkapan pada masing-masing bank beragam, ada yang meningkat, mempertahankan, dan penurunan. Penurunan pengungkapan ini terdapat pada Bank Jatim yang tidak mengungkapkan persiapannya, penurunan salah satunya dikarenakan tingginya rasio kredit macet yang dimiliki sehingga bank membentuk tim khusus untuk memperbaikinya dan lebih memfokuskan kepada hal ini (Rahman, 2017). Tahun 2018 merupakan tahun terakhir perbankan melakukan persiapan implementasi keuangan berkelanjutan, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun ini, yaitu sebesar 556% dari tahun 2017. Di tahun 2018 semua bank dalam kategori BUKU 3 mengungkapkan berbagai persiapannya, dan mengalami peningkatan lebih dari 100% setiap banknya. Minat perbankan dalam implementasi keuangan berkelanjutan khususnya pada kategori BUKU 3 ini terlihat pada tahun 2016, dimana setiap bank mulai mengungkapkan persiapannya sebelum adanya aturan dari OJK walaupun tidak banyak pengungkapannya tetapi hal ini sudah menunjukkan adanya perhatian perbankan terhadap keuangan berkelanjutan.

Kategori BUKU 4 merupakan bank dengan modal inti diatas 30 triliun, dan dalam penelitian ini terdapat 5 bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 yaitu Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan Niaga. Tahun 2015 kelima bank dalam kategori BUKU 4 sudah mengungkapkan persiapannya untuk mengimplementasikan. Jika dibandingkan pengungkapan pada tahun 2015 maka perbankan pada BUKU 4 memiliki pengungkapan dengan jumlah yang lebih tinggi dari BUKU 3, sehingga perbankan pada BUKU 4 seharusnya lebih siap untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan karena terdapat minat sebelum adanya aturan untuk mengimplementasikannya. Tahun 2016 kelima bank tersebut tetap mengungkapkan persiapannya dan terdapat peningkatan secara keseluruhan sebesar 35% dengan peningkatan pada tiga bank. Bank BCA mengalami penurunan pengungkapan sebesar 50%, hal ini dapat diakibatkan tingkat kredit macet yang meningkat 85% dari tahun sebelumnya sehingga fokus bank teralihkan untuk menurunkan kredit macet ini, terbukti pada tahun 2017 tingkat kredit macet yang dimilikinya mulai menurun dan pengungkapannya kembali meningkat normal pada tahun tersebut.

Tahun 2017, selain Bank BCA yang mengalami peningkatan pengungkapan terdapat bank tiga bank lainnya juga yang mengalami pengungkapan. Bank Niaga mengalami penurunan yang tidak signifikan, sebesar 14% dan tetap meningkat di tahun selanjutnya. Dengan disahkannya POJK No. 51 peningkatan pengungkapan persiapan implementasi bagi perbankan BUKU 4 lebih terlihat dengan 80% perbankan mengalami peningkatan yang masing-masingnya diatas 100%. Jika dibandingkan dengan perbankan kategori BUKU 3, peningkatan pengungkapan terjadi pada 60%, penurunan 20%, dan mempertahankan tingkat pengungkapan 20% berdasarkan jumlah sampel, kecilnya persentase jumlah perbankan yang meningkatkan pengungkapan persiapan daripada perbankan BUKU 4 dapat dikarenakan kondisi ekonomi masing-masing perbankan. Peningkatan pengungkapan setelah disahkannya peraturan menunjukkan dengan adanya peraturan mengenai keuangan berkelanjutan maka program dan perilaku perbankan pun akan berubah, mengikuti arah peraturan tersebut khususnya pada perbankan yang termasuk dalam BUKU 4.

Tahun 2018 peningkatan pengungkapan pada perbankan BUKU 4 tetap terjadi tetapi dengan persentase kenaikan yang tidak setinggi tahun sebelumnya. Pengungkapan persiapan BUKU 4 tahun 2018 meningkat sebesar 111% hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya perbankan sudah melakukan berbagai persiapan dapat terlihat dengan tingginya tingkat pengungkapan tahun 2017. Berbeda dengan kategori BUKU 3 yang baru melakukan berbagai persiapan pada tahun terakhir tahap persiapan. Dari pengungkapan pada kategori BUKU 3 dan BUKU 4 dari 2015 hingga 2018, BUKU 3 melakukan tahap persiapan ini akibat dari peraturan yang mengharuskan untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan di tahun 2019 sehingga berbagai persiapan yang dilakukan hanya pada tahun terakhir, hanya terdapat 40% yang dapat dinilai memiliki minat dan ketertarikan dalam keuangan berkelanjutan dilihat dari peningkatan persiapan yang terus meningkat. Sedangkan perbankan pada BUKU 4 memiliki ketertarikan sejak tahun 2016 dilihat dari pengungkapannya yang lebih tinggi, walaupun terjadi penurunan pada Bank BCA pada tahun 2016 dan Bank Niaga pada tahun 2017 tetapi keduanya tetap meningkat pengungkapannya pada tahun-tahun selanjutnya. Bank BCA yang memiliki tingkat penurunan pengungkapan tertinggi selama 2015 hingga 2018 tetapi pada akhir masa persiapannya memiliki pengungkapan yang tertinggi.

Perbankan milik pemerintah merupakan perbankan yang modalnya berasal dari pemerintah, dan keadaan ekonominya dipantau oleh pemerintah. Perbankan milik swasta merupakan perbankan yang modalnya dimiliki oleh swasta. Tahun 2015 pengungkapan persiapan implementasi keuangan berkelanjutan pada kedua bank swasta yaitu BCA dan Niaga lebih besar diungkapkan, dikarenakan bank swasta mempertahankan bank tersebut tanpa dana dari pemerintah sehingga keuangan berkelanjutan merupakan salah satu kreatifitas yang baru. Hal ini juga terlihat pada tahun 2018 sebagai tahun terakhir persiapan implementasi keuangan berkelanjutan, kedua bank lainnya yaitu OCBC dan BCA milik swasta mengungkapkan lebih tinggi dari pada bank milik pemerintah sehingga keuangan berkelanjutan ini lebih diminati oleh perbankan swasta. Namun jika dilihat dari konsistensi pengungkapannya, kelima bank milik pemerintah yaitu BJB, BTN, Mandiri, BNI, dan BRI memiliki konsistensi pengungkapan sejak tahun 2015 terus meningkat hingga pada puncaknya tahun 2018. Hal ini menandakan perbankan milik pemerintah memiliki ketertarikan untuk mempersiapkan implementasi keuangan berkelanjutan ini setiap tahunnya meningkat sehingga pada saat implementasinya perbankan milik pemerintah ini dapat menjadi contoh bagi perbankan lainnya yang belum mengimplementasikan keuangan berkelanjutan secara totalitas. Kedua jenis bank berdasarkan kepemilikan ini memiliki ketertarikan untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda.

Tabel 2 Data Tahap Persiapan Keuangan Berkelanjutan Berdasarkan Persiapannya

TAHUN	EDU	SPO	RAKB	TOTAL
2015	11	14	18	43
2016	18	31	34	83
2017	44	75	132	251
2018	121	152	520	793
TOTAL	194	272	704	1170

Sumber: Data diolah, 2020

Persiapan yang dilakukan oleh perbankan terdiri dari 3 bagian, yaitu memberikan edukasi internal, penyesuaian standar, dan penyusunan rencana implementasi keuangan berkelanjutan. Secara total persiapan yang dilakukan oleh perbankan semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, mulai tahun 2015 hingga tahun akhirnya yaitu 2018. Setiap bagian persiapannya juga meningkat, setiap tahunnya, hal ini menandakan semakin tahun perbankan mengadakan berbagai persiapan dan meningkatkan volume persiapannya. Pada bagian pemberian edukasi pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan persiapan penyesuaian standar dan penyusunan rencana implementasi yang diatas 100%, selain itu juga bagian edukasi memiliki jumlah pengungkapan yang lebih sedikit jika dibandingkan pengungkapan pada bagian penyesuaian standar dan perencanaan implementasi keuangan berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan perbankan yang tidak terlalu memperhatikan kedalaman pengetahuan dan bentuk edukasi lainnya bagi pihak internal yang akan terlibat dalam implementasi ini, karena rata-rata perbankan mengadakan edukasi hanya untuk pejabat perbankan masing-masing.

Ada lima bank yang melakukan pemberian edukasi pada tahun 2015, tetapi tidak semuanya melakukan penyesuaian prosedur yaitu Mandiri, OCBC, BCA, BNI, dan Niaga. Tetapi terdapat lima bank yang melakukan penyesuaian prosedur pada tahun 2015 yaitu BJB, OCBC, Permata, BNI, dan Niaga, hanya tiga bank yang memberikan edukasi, OCBC, BNI dan Niaga. Jika pemberian edukasi dilakukan oleh perbankan belum tentu perbankan akan melakukan penyesuaian standar dan menyusun rencana implementasi, tetapi jika perbankan sudah melakukan penyesuaian standar maka ke depannya perbankan akan memberikan edukasi dan menyusun rencana implementasi. Sehingga jika perbankan melakukan penyesuaian standar pada tahun 2015, hal ini dapat menunjukkan keseriusan perbankan dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutannya ditahun yang akan datang. Tak menutup

kemungkinan juga perbankan yang sudah memberikan edukasinya pada tahun 2015 tidak menunjukkan keseriusannya dan ketertarikannya dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan.

Minat merupakan keinginan dan juga ketertarikan dalam suatu hal, jika minat tersebut benar ingin dilaksanakan maka terdapat sebuah perencanaan yang disusun untuk menggapai minat tersebut (Kambuaya, 2015). Dalam hal ini minat perbankan dalam keuangan berkelanjutan dapat direncanakan dan disusun dalam RAKB. Terdapat lima bank yang sudah menunjukkan minatnya dengan menyusun rencananya tahun 2015 yaitu Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan Niaga dan empat bank diantaranya, Mandiri, BCA, BNI, dan Niaga, dilengkapi dengan pemberian edukasi sebagai pendukung bahwa ketika rencana tersebut dijalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan harapannya. Perbankan yang hanya mengungkapkan sudah menyusun rencana untuk implementasi dapat dikatakan memiliki minat, walaupun tidak sebesar yang melakukan persiapan yang lebih. Secara keseluruhan, pada awal tahun 2015 sesuai dengan sampel 80% perbankan sudah melakukan minimnya persiapan implementasi keuangan berkelanjutan pada bagian-bagian tertentu.

Tahun 2016, sebelum keluarnya POJK mengenai keuangan berkelanjutan pengungkapan persiapan pada pemberian edukasi, penyesuaian standar, dan penyusunan rencana sudah bertambah. Penyesuaian rencana dan penyusunan rencana memiliki jumlah pengungkapan yang tidak jauh berbeda, dengan posisi lebih banyak diungkapkan dibandingkan dengan pemberian edukasi. Terdapat empat bank yang sudah mengungkapkan ketiga persiapan yang dilakukan yaitu BJB, BTN, BRI, Niaga, berbeda pada tahun sebelumnya hanya terdapat dua perbankan yang mengungkapkan persiapannya secara lengkap yaitu BNI dan Niaga. Selain itu juga, perbankan yang memiliki keseriusan dengan mulai melakukan penyesuaian standar sudah semakin bertambah menjadi delapan bank yaitu BJB, BTN, Jatim, OCBC, Permata, BNI, BRI, Niaga, dan perbankan yang memiliki minat serta keseriusan dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan ini bertambah menjadi sembilan bank, dari yang sebelumnya hanya terdapat tujuh bank. Minat dan keseriusan ini ditunjukkan dengan pengungkapan perbankan dalam penyesuaian standar, atau menyusun rencana implementasi disertai dengan pemberian edukasi.

Tahun 2017, saat POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan mulai disahkan sehingga setiap LJK termasuk perbankan memiliki kewajiban untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing kategori. Dengan disahkannya peraturan baru mengenai implementasi keuangan berkelanjutan, pengungkapan pada ketiga bagian persiapan juga meningkat mencapai di atas 100% bahkan pengungkapan penyusunan rencana mencapai di atas 200%. Hal ini membuktikan dengan adanya aturan yang mengatur keuangan berkelanjutan dan mewajibkan penerapannya maka perbankan semakin giat melakukan berbagai persiapan untuk menanggapi peraturan tersebut dan dilakukan oleh 90% perbankan. Tetapi terdapat 10% perbankan yang tidak bergerak untuk mempersiapkan implementasi keuangan berkelanjutan ketika peraturannya disahkan namun melakukan beberapa persiapannya sebelum peraturan tersebut disahkan. Dengan meningkat tingginya berbagai persiapan yang dilakukan oleh perbankan dalam implementasi keuangan berkelanjutan setelah aturan yang dikeluarkan POJK mewajibkan setiap perbankan untuk menerapkannya maka dapat dilihat bahwa persiapan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dikatakan keraguan perbankan dikemudian hari untuk menerapkannya.

Keraguan perbankan ini dikarenakan ketidakpastian ketika menerapkan keuangan berkelanjutan apakah perbankan dapat mempertahankan pendapatan yang dimiliki berdasarkan bunga peminjaman kepada nasabah. Jika perbankan memiliki inisiatif untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebelum adanya aturan yang mengaturnya maka ada kemungkinan pengajuan peminjaman dana kepada bank tersebut akan menurun dikarenakan berbagai persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satu persyaratannya yang harus dimiliki perusahaan ketika mengajukan pinjaman dana yaitu analisis dampak lingkungan (AMDAL), apakah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya tanpa merusak atau mengabaikan lingkungan sekitar tempat proyek atau kegiatan operasionalnya berlangsung. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2018, 100% perbankan pada kategori BUKU 3 dan BUKU 4 melakukan berbagai persiapan untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Selain itu juga peningkatan persiapan juga masih meningkat sangat tinggi mencapai di atas 100%.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir perbankan dapat mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan implementasinya pada tahun 2019. Pemberian edukasi yang pada tahun sebelumnya memiliki tingkat kenaikan yang tidak jauh berbeda dengan penyesuaian standar, kini memiliki peningkatan yang jauh tinggi dengan penyesuaian standar. Pada tahun 2016 perbankan fokus

mempersiapkan standar prosedur yang akan digunakan saat implementasi, tahun 2017 perbankan fokus menyusun rencana, strategi yang akan diterapkan saat implementasi tetapi tetap diimbangi dengan pemberian edukasi serta penyesuaian edukasi, dan tahun 2018 perbankan tetap fokus untuk menyusun rencana dan strategi yang akan diterapkan, tetapi diimbangi dengan pemberian edukasi. Tahun 2018 peningkatan persiapan edukasi lebih tinggi dari pada penyesuaian standar dikarenakan penyesuaian standar sudah dilakukan oleh beberapa bank yang memiliki keseriusan diawal untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan secara bertahap, sehingga pada saat penerapan akan dilakukan pemberian edukasi semakin dipersiapkan.

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui karakteristik data, dan distribusi data yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif diuji menggunakan *software* SPSS 25 dengan data yang akan disajikan berupa nilai *minimum*, nilai *maximum*, nilai *mean*, dan *standard deviation*. Dalam analisis statistik deskriptif ini juga dilakukan uji normalitas dengan menggunakan *skewness* dan *kurtosis*.

Jumlah perbankan dalam sampel (N) berjumlah 10 bank dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Tahun 2015 hingga tahun 2017 nilai *minimum* pengungkapan tidak meningkat tinggi namun hanya berkisar pada 0 dan 1. Dengan nilai *minimum* ini dapat menunjukkan pada tahun 2015 hingga tahun 2017, sebelum adanya peraturan penerapan keuangan berkelanjutan dan setelah disahkannya peraturan tersebut, masih terdapat perbankan yang tidak tertarik untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan sehingga tidak melakukan persiapannya. Tahun 2018 nilai *minimum* pengungkapan meningkat menjadi 29, tahun 2018 merupakan tahun terakhir perbankan mempersiapkan standar, rencana, dan pengetahuannya untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan keuangan berkelanjutan. Walaupun nilai *minimum* dari tahun 2015 hingga tahun 2017 tidak mengalami peningkatan tinggi, tetapi nilai *maximum* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan nilai pengungkapan ini memperlihatkan setiap tahunnya persiapan yang dilakukan perbankan secara umum juga meningkat.

Nilai *mean* atau yang nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah pengungkapan dibagi dengan jumlah perbankan yang mengungkapkan. Tahun 2015 dan tahun 2016 nilai *mean* mengalami peningkatan, walaupun tidak tinggi tetapi dengan adanya peningkatan ini membuktikan persiapan perbankan semakin tahun semakin meningkat tanpa adanya peraturan yang mengatur waktu penerapan keuangan berkelanjutan. Tahun 2017 dan tahun 2018 ketika peraturan penerapan keuangan telah disahkan, nilai *mean* meningkat semakin tinggi. Tingginya peningkatan nilai *mean* pada tahun 2017 dan tahun 2018 ini memperlihatkan bahwa semakin banyak persiapan implementasi keuangan berkelanjutan ketika adanya aturan dan adanya kewajiban penerapan di tahun 2019. Nilai *std. deviation* atau yang biasa disebut standar deviasi ini merupakan sebaran data (Priyatno, 2012), setiap tahunnya nilai standar deviasi semakin meningkat. Meningkatnya nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa pengungkapan persiapan implementasi keuangan berkelanjutan semakin luas, yang berarti setiap tahunnya semakin bertambah perbankan yang melakukan persiapan implementasi ini.

Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang atau yang biasa disebut *crossstab* akan menyajikan data dalam bentuk persentase, dan menyilangkan antara dua data yang dimiliki. Ada tiga kelompok data yang akan digunakan, yaitu indikator persiapan perbankan untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, kategori perbankan, dan jenis kepemilikan perbankan. Indikator persiapan perbankan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pemberian edukasi atau yang selanjutnya disebut edukasi, penyesuaian standar dan prosedur operasional atau yang selanjutnya disebut SPO, dan perencanaan dalam pengimplementasian keuangan berkelanjutan atau yang selanjutnya disebut dengan RAKB. Masing-masing indikator ini merupakan data utama yang diperoleh dari jumlah kosakata yang diungkapkan dalam laporan yang dipublikasikan masing-masing sampel perbankan.

Hasil tabulasi silang antara indikator pemberian edukasi sebagai persiapan implementasi keuangan berkelanjutan dengan kategori perbankan yang akan mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada tahun 2019 yaitu BUKU 3 dan BUKU 4. Persiapan implementasi keuangan berkelanjutan pada bagian pemberian edukasi disajikan dengan perkembangan pada tahun 2015,

efektifnya *roadmap* keuangan berkelanjutan, sampai dengan tahun 2018, tahun terakhir perbankan melakukan persiapan implementasinya. Kategori BUKU 3 memiliki grafik yang lebih baik dari pada kategori BUKU 4. Kategori indikator yang mempersiapkan pada kategori BUKU 3 dari tahun 2015 semakin meningkat dan tidak mengalami penurunan hingga tahun 2018, walaupun terdapat grafik naik turun pada dua bank, yaitu Jatim dan OCBC. Pada kategori BUKU 4 secara umum grafik nilai *count* tidak stabil, tahun 2015 nilai *count* kategori indikator yang mempersiapkan lebih tinggi dari pada kategori BUKU 3. Tahun 2016 nilai *count* kategori indikator yang mempersiapkan menurun, walaupun tidak jauh menurun, dan meningkat kembali pada tahun 2017 dan tahun 2018. Kategori BUKU 4 memiliki jumlah perbankan lebih tinggi dengan grafik tidak stabil dibandingkan kategori BUKU 3 dalam hal persiapan pemberian edukasi, jumlahnya tiga bank, yaitu BCA, BNI, dan Niaga.

Hasil tabulasi silang antara indikator penyesuaian standar prosedur operasional perbankan menuju kearah implementasi keuangan berkelanjutan. Realisasi implementasi keuangan berkelanjutan pertama pada tahun 2019 dan diterapkan pada perbankan kategori BUKU 3 dan BUKU 4. Persiapan dalam hal penyesuaian standar prosedur ini dimulai pada tahun 2015 hingga 2018 dan grafik yang stabil terdapat pada kategori BUKU 4. Perbankan pada BUKU 4 setiap tahun bertambah jumlah yang menyesuaikan standar operasionalnya dengan keuangan berkelanjutan. Kategori BUKU 3 tidak memiliki grafik yang stabil meningkat tetapi mengalami penurunan, penurunan jumlah perbankan yang meningkatkan penyesuaiannya dan penurunan penyesuaian yang dilakukan perbankan. Kategori BUKU 3 memiliki grafik yang tidak stabil terdapat pada BTN dan Jatim. Sedangkan dalam kategori BUKU 4 memiliki grafik yang meningkat dalam jumlah perbankan yang menyesuaikan standar prosedurnya dan peningkatan penyesuaian yang terlihat dari pengungkapannya, terjadi penurunan pada dua bank yaitu BRI dan Niaga. Penyesuaian standar prosedur operasional dilakukan dengan baik pada perbankan yang termasuk dalam kategori BUKU 4 jika dibandingkan dengan kategori BUKU 3 hal ini terlihat dari grafik yang ditunjukkan dengan nilai *count* karena dilihat dari jumlah perbankannya.

Hasil tabulasi silang antara indikator penyusunan rencana implementasi keuangan berkelanjutan atau RAKB dengan kategori BUKU 3 dan BUKU 4 yang akan mengimplementasikan keuangan berkelanjutan tahun 2019. Kategori ini merupakan kategori pertama yang diwajibkan untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, dan persiapan implementasi ini dilakukan sebelum tahun 2019. Pada penelitian ini periode yang digunakan yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018, dari empat periode yang digunakan ini secara grafik nilai *count*, jumlah perbankan yang merencanakan implementasi keuangan berkelanjutan stabil dan meningkat untuk kedua kategori ini. Tetapi terdapat penurunan pengungkapan pada dua bank kategori BUKU 4 yaitu BCA, dan Niaga, walaupun terjadi penurunan pengungkapan, tetapi penurunan ini tidak mencapai 50%. Secara umum dalam penyusunan perencanaan implementasi keuangan berkelanjutan sudah ditanggapi dengan baik oleh perbankan kategori BUKU 3 dan BUKU 4.

Hasil persilangan data jenis kepemilikan perbankan dengan pemberian edukasi untuk persiapan implementasi keuangan berkelanjutan. Dari penyilangan data dapat dilihat nilai *count* pada jenis kepemilikan pemerintah jumlahnya terus meningkat, tidak mengalami penurunan jumlah perbankan yang mempersiapkan. Namun jumlahnya dapat bertahan pada tahun 2017, hal ini dikarenakan terjadinya pergantian pengungkapan antara BNI dan Jatim tahun 2016 dan 2017 sehingga membuat jumlah perbankan tetap konstan. Pada jenis kepemilikan swasta nilai *count* tidak stabil membentuk satu garis lurus, hal ini dikarenakan jumlah total perbankan yang lebih sedikit dan juga terdapat tiga perbankan yang tidak konsisten meningkatkan persiapannya, konsistensi dalam pemberian jumlah edukasi. Ketiga bank tersebut adalah OCBC, BCA, dan Niaga, dua diantaranya yaitu BCA dan Niaga secara bergantian tidak melakukan pemberian edukasi keuangan berkelanjutan ditahun 2016 dan 2017, sedangkan satu bank lainnya yaitu bank OCBC tidak benar-benar mempersiapkan implementasi keuangan berkelanjutan dalam hal pemberian edukasi ini karena tidak memberikan edukasi keuangan berkelanjutan selama dua tahun berturut-turut, tahun 2016 dan 2017. Dari penyilangan data ini terlihat perbankan milik pemerintah peduli dengan edukasi yang dimiliki sumber dayanya saat mengimplementasikan keuangan berkelanjutan.

Penyilangan data penyesuaian standar prosedur operasional sebagai salah satu persiapan implementasi keuangan berkelanjutan dengan jenis kepemilikan perbankan. Penyesuaian standar prosedur operasional ini tidak begitu diperhatikan oleh perbankan terlihat dari pengungkapannya yang jumlahnya tidak besar. Grafik nilai *count* pada kedua jenis kepemilikan perbankan dari tahun 2015 hingga 2018 stabil dan tetap dipertahankan jumlah perbankannya. Berdasarkan dengan

pengungkapannya pada jenis kepemilikan pemerintahan terdapat tiga perbankan yang memiliki grafik yang tidak konsisten, yaitu BRI, BTN dan Jatim, sedangkan pada jenis kepemilikan swasta hanya terdapat satu perbankan, yaitu Niaga. Dalam penyesuaian standar prosedur operasional perbankan milik swasta lebih konsisten tetapi perbankan milik pemerintah mengungkapkan lebih banyak, lebih fokus.

Hasil tabulasi silang antara perencanaan implementasi keuangan berkelanjutan dengan jenis kepemilikan menunjukkan ketertarikan perbankan terhadap keuangan berkelanjutan. Nilai *count* menunjukkan grafik yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2018 dan stabil pada kedua jenis kepemilikan perbankan, milik pemerintah maupun milik swasta. Kestabilan ini diukur dari jumlah perbankan yang mengungkapkan rencananya, bukan dari kestabilan dalam angka pengungkapan. Perbankan milik pemerintah secara umum memiliki grafik perencanaan yang lebih tinggi, lebih mendetail karena pengungkapannya dalam jumlah lebih besar. Perbankan milik pemerintah, Jatim, memiliki grafik meningkat tetapi tidak merencanakan keuangan berkelanjutan dari tahun 2015 hingga 2017, dan akhir tahun tahap persiapan baru mengungkapkan rencananya. Perbankan milik swasta juga mengungkapkan rencananya dalam implementasi keuangan berkelanjutan tetapi tidak stabil, OCBC selama tiga tahun pertama, tahun 2015-2017, tidak mengungkapkan rencananya, Permata tidak mengungkapkan rencananya selama dua tahun pertama, tahun 2015 dan 2016. Bank milik swasta lainnya, BCA dan Niaga mengungkapkan rencananya dari tahun 2015 hanya grafiknya tidak stabil. Dalam perencanaan ini bank milik pemerintah memiliki perhatiannya tersendiri, sehingga merencanakannya lebih awal sebelum aturan resminya dikeluarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa minat perbankan dalam keuangan berkelanjutan masih rendah, khususnya pada perbankan dalam kategori BUKU 3 dan BUKU 4. Namun walaupun minat yang dimiliki masih rendah perbankan masih memiliki perhatian untuk melakukan persiapan, hal ini terlihat dari adanya pengungkapan persiapan yang dilakukan beberapa perbankan pada tahun 2015 dan 2016, tahun sebelum adanya aturan atau regulasi wajib untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Perbankan sudah melakukan persiapannya secara lengkap pada tahun terakhir persiapannya, tahun 2018, yaitu persiapan dalam hal pemberian edukasi, penyesuaian standar operasional prosedur, dan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Persiapan yang dilakukan berfokus pada perencanaan implementasi program keuangan berkelanjutan. Persiapan yang dilakukan diungkapkan pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) sebesar 366 kata dan frasa dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebesar 804 kata dan frasa, pengungkapan pada laporan keberlanjutan lebih banyak jika dibandingkan dengan pengungkapan pada laporan tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan menerapkan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu wujud pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, S. M., & Fredy, H. (2017). Mekanisme Governance dan Pengungkapan Sustainable Finance: Untuk Melihat Tingkat Kesiapan Penerapan Sustainable Finance Pada Perusahaan Jasa Keuangan Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 437-447.
- APLN. (2016, Desember 31). *Annual Report PT Agung Podo Moro Land*. Retrieved November 5, 2019, from Agung Podo Moro Land: <https://agungpodomoroland.com/page/annualreport/Annual-Report-2016>
- Aziz, A. (2014). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Indonesia Periode Tahun 2011-2012). *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 65-84.
- Basri, M. A. (2018). Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Takalar. *Universitas Negeri Makassar*, 1.
- Birjandi, H., Hakemi, B., & Sadeghi, M. (2015). The study effect agency theory and signaling theory on the level of voluntary disclosure of listed companies in Tehran Stock Exchange. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 6, No. 1, 174-183.

- Budiharjo, R. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Return Saham Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Dan Moderating. *Jurnal Tekun Universitas Mercu Buana*. Vol. 7. No 1, 1-19.
- Carningsih. (2009). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Hubungan Antara Kinerja Keuangan Dengan Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Universitas Gunadarma*, 1.
- Endiana, D. M. (2018). Implementasi Corporate Governance Pada Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 98.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana.
- Falichin, M. (2011). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Reaksi Investor dengan Environmental Performance Rating dan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Undip*, 34.
- Ghozali, H. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hari Y, C. B. (2012). Karakteristik Dewan Komisaris Dan Manajemen Laba Di Indonesia. *Majalah Ekonomi No. 1*, 1.
- Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Indonsia Treasury Review* , 69-90.
- Kambuaya, C. (2015). Social Work Journal. *Pengaruh Motivasi, Minat, Kedisiplinan Dan Adaptasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah Asal Papua Dan Papua Barat Di Kota Bandung*, 157-166.
- KNKG. (2006, December 31). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Retrieved October 21, 2019, from ECGI Global: https://ecgi.global/sites/default/files//codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf
- Martantina, L. (2014). Kajian Empiris Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Equilibrium* , 18-19.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017, Desember 31). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek*. Retrieved Oktober 16, 2019, from Otoritas Jasa Keuangan: [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-57-POJK.04-2017/SAL%20POJK%2057%20-%20Tata%20Kelola%20PE\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-57-POJK.04-2017/SAL%20POJK%2057%20-%20Tata%20Kelola%20PE(1).pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi PJOK Nomor 51/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan.
- Priyatno, D. (2012). *Belajar Cepat Olah Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putri, Wibawa, & Persada. (2017). Analisis Deskriptif dan Tabulasi Silang pada Konsumen Produk Kosmetik Kategori Merek Mewah: Studi Kasus 6 Universitas di Kota Surabaya. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 260-264.
- Rahman, A. (2017, Januari 9). *Atasi Kredit Bermasalah, Bank Jatim Bentuk 'Pasukan Khusus'*. Retrieved from Bisnis.Com: <https://finansial.bisnis.com/read/20170109/90/617906/atasi-kredit-bermasalah-bank-jatim-bentuk-pasukan-khusus>
- Simamora, S. C. (2019). Implementasi Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 32-49.

SWA. (2019, Januari 30). *Pentingnya Penguatan Peran Direktur dan Komisaris*. Retrieved Maret 19, 2020, from SWA: <https://swa.co.id/swa/trends/pentingnya-penguatan-peran-direktur-dan-komisaris>

Syamsudin, A. (2016). Evaluasi Ketercapaian Standar Isi Perkembangan Nilai-Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini Pada Semester Gassal 2016/2017 KB/TK Pedagogia. *Jurnal Pendidikan Anak* , 765-777.